

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BKSDA Kabupaten Berau telah melaksanakan perannya dalam melakukan pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi dengan melaksanakan langkah Pre-emptif, Preventif, Represif, dan Pemulihan serta melakukan kerjasama dengan lembaga Kepolisian dan Central for Orang utan Protection. Hanya saja pada langkah preemtif yang dilakukan oleh BKSDA masih kurang efektif untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting ekosistem satwa liar yang dilindungi sebagai keanekaragam hayati yang mempunyai fungsi ekologi, sehingga perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau sampai sekarang masih terjadi.
2. Dalam melakukan pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi BKSDA menghadapi beberapa kendala, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya satwa liar dalam suatu keanekaragaman hayati untuk menjaga fungsi ekologi satwa liar yang dilindungi, serta masih kurangnya sarana dan prasarana BKSDA dalam melakukan pengendalian terhadap satwa liar yang dilindungi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. BKSDA perlu melibatkan masyarakat sekitar dalam melakukan pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau, agar langkah preemtif dapat berjalan maksimal.
2. BKSDA perlu meningkatkan fasilitas atau sarana prasarana untuk dapat melakukan pengendalian terhadap satwa liar yang dilindungi seperti alat transportasi yang digunakan oleh petugas BKSDA dalam melakukan pemantauan di perkampungan dan kandang untuk menampung satwa liar yang dilindungi
3. BKSDA perlu selalu berkoordinasi dengan Kepolisian dan COP di dalam pengendalian perdagangan dan pengembalian satwa liar yang dilindungi ke habitatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Andreas Pramudiyanto, 2014, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, Cetakan Pertama, Setar Pres, Malang
- Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Jeffrey A McNeely, 1992, *Ekonomi Dan Keanekaragaman Hayati, Mengembangkan Dan Memanfaatkan Perangsangan Ekonomi Dan Melestarikan Sumber Daya Alam*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1991, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Cetakan Pertama, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Laden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Cetakan Pertama, Penerbit Erlangga, Jakarta
- M.Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Yogyakarta
- Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (IU-Press), Jakarta
- Valentinus Darsono, 1992, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Wiryono, 2013, *Pengantar Ilmu Lingkungan, (Edisi Revisi)*, Pertelon Media, Bengkulu

Tesis :

Riky Ilhamsyah Dinigrat, 2017, "*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*" *Studi kasus terhadap perdagangan burung paruh enggang di provinsi Kalimantan Barat*, Universitas Tanjungpura

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15. Sekretariat Negara. Jakarta

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahan *Convention On International Trade Of Endangered Species Wildlife Fauna And Flora* (CITES). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Konservasi Sumber Daya Alam

Peraturan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor P. 18/Menhut-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 182. Jakarta

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Internet :

<http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.W7IbXGgzBIU>

<https://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html>https:

<https://dosenekonomi.com/bisnis/tujuan-perdagangan-internasional>

<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-menurut-beberapa.html>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aparat/>

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/05/17/perdagangan-satwa-ilegal-di-kertakhanyar-digagalkan-ini-jenis-satwanya>

<http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.W7IbXGgzBIU>

<http://bksdakaltim.menlhk.go.id/page/visi-dan-misi>

<http://bksdakaltim.menlhk.go.id/page/struktur-organisasi>

<http://bksdakaltim.menlhk.go.id/page/tentang-bksda-kaltim>